

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

REZKI AMALIA
NPM. 1305170288



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Rezki Amalia, NPM. 1305170288. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2017.

Adapun Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang mengidentifikasi sistem pengendalian intern dalam penilaian resiko tidak berjalan baik pada Dispenda tahun ke tahun dan cukup rendah pada Dispenda Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem intern penerimaan pajak hotel dan reklame yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil semua keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pajak hotel sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari cukup tingginya efektivitas realisasi yang diperoleh. Sistem pengendalian intern pajak reklame belum cukup baik. Ini dapat dilihat dari rendahnya efektivitasnya realisasi diperoleh.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun proposal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, proposal ini berjudul “ **Analisis sistem Pengendalian Intern Penerima Pajak Hotel dan Pajak Reklame pada Dispenda Kota Medan**”

Dalam penulisan proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku – buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman – teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang dan yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang diberikan kepada penulis, walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu, namun dapat dihati selamanya. Kemudian tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama – nama dibawah ini :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ihsan Rambe, SE., M.Si., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pimpinan Dispenda Kota Medan yang telah bersedia member izin riset kepada penulis.
7. Buat teman – teman seperjuangan kelas H Malam stambuk 2013 yang banyak membantu penulis.

Akhir kata semoga kiranya proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassallamu' alaikum wr. wb.

Medan, Maret 2017
Penulis

Rezki Amalia

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Sistem Pengendalian Intern.....	8
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	8
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	8
c. Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern.....	10
2. Pendapatan Asli Daerah.....	15

a. Pajak Daerah.....	15
b. Retribusi Daerah.....	17
3. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Defenisi Operasional Variabel.....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Kisi – Kisi wawancara.	23
Table III.2 Waktu Penelitian Direncanakan.	24
Table IV.1 Tingkat Efektifitas Pajak Hotel.....	44
Tabel IV. 2 Jumlah WP Hotel yang terdaftar.	45
Tabel IV. 3 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame.	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1 Kerangka Berfikir.	22
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya sumber – sumber pendapatan didaerah yang harus digali dan dikelola, maka pemerintah daerah mendirikan suatu organisasi pelaksana dibidang ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Dinas ini merupakan suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber – sumber pendapatan daerah dari sector pajak maupun retribusi. Dispenda perlu mengupayakan usaha – usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efesien dalam pelaksanaan penggalian dana, penggunaan dana, pengembangan sumber – sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) “ PAD adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Menurut Halim (2003) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten / kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hal ini meningkatkan Pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Undang – Undang nomor 28 tahun 2009).

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Menurut pendapat Smeet yang dikutip Sundry (2005 : 10), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat ditunjukkan dalam hal individual.

Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapat asli daerah adalah pajak hotel. Secara umum hotel adalah bangunan yang dipakai untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa pengina/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan dan lain – lain

Menurut UU. No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah prose yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Mengingat pelaksanaan sistem sistem pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpulan data, prosedur peetapan pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpangan yang dilakukan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut diperlukan agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah yang dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005, hal, 593), yaitu dengan cara : (1) memperluas basis penerimaan pajak, (2) memperkuat proses pemungutan (3) meningkatkan pengawan, (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Menurut UU No. 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem Pengendalian Intern, yangb selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan ssecara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika kita melakukan perbandingan antar anggaran (target) dengan realisasi maka, penerimaan pajak hotel dan pajak reklame yang dilakukan pihak Dispenda Kota Medan untu meningkatkan pendapatan belum sesuai dengan target yang diharapkan, serta target yang diberikan selalu saja ditingkatkan meskipun ditahun sebelumnya penerimaannya masih rendah disbanding target. Ini menunjukkan tingkat efektivitas yangv rendah dalam pengawasaan, sementara pada pasal 2 PP. No. 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Berikut adalah data target realisasi pajak hotel pada Dinas Pendapatan Kota Medan:

Tabel I.1
Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2012 – 2016
Dinas Pendapatan Kota Medan
(dinyatakan dalam ribuan)

HOTEL			
Tahun	Realisasi	Targert	Efektivitas
2012	65.859.844	81.000.000	81,3%
2013	76.944.413	81.000.000	95,0%
2014	82.051.748	81.500.000	100,7%
2015	84.200.613	87.980.000	92,86%
2016	95.322.427	91.980.801	104,18%

Pada tabel diatas dapat dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2012 sebesar 81,3% kemudian pada tahun 2013 menjadi 95%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 100,7%, pada tahun 2015 menjadi 92,86% dan pada tahun 2016 menjadi 104,18% tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, seharusnya peningkatan efektivitas ini dapat dipertahnkan atau bahkan

ditingkatkan pada tahun – tahun berikutnya namun masih perlu dilakukan evaluasi terkait temuan – temuan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak reklame, pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame. Menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Berikut adalah data target dan realisasi pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan :

**Tabel I.2 Data Target Dan Realisasi Pajak Rekalme Tahun 2012 – 2016
Dinas Pendapatan Kota Medan
(dinyatakan dalam ribuan)**

Pajak Reklame			
Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas
2012	25.954.914	64.161.250	40,45%
2013	23.343.045	69.161.250	33,76%
2014	10.709.910	59.161.250	18,10
2015	3.551.947	49.161.250	7,23%
2016	17.508.256	89.832.375	19,49%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya tingkat efektifitas penerimaan pajak reklame dari tahun ketahun mengalami penurunan, pada tahun 2012 tingkat efektifitas adalah sebesar 40,45% kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 33,76% penurunan terjadi lagi pada tahun 2014 tingkat efektifitas menurun menjadi 18,10% kemudian pada tahun 2015 menjadi 7, 23% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 19, 49% artinya penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan selalu tidak mencapai target yang

ditetapkan, hal ini mengindikasikan sistem pengendalian penerimaan pajak yang kurang baik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terkait pajak reklame.

Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah yang berhubungan dengan pajak hotel dan pajak reklame ini tentunya terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu berhubungan dengan lingkungan pengendalian dan penaksiran resiko yang dilakukan oleh pihak DISPENDA (Undang – Undang NO. 60 tahun 2008), dalam lingkungan pengendalian, jika pengorganisasian dalam penerimaan pajak berjalan dengan baik, ketika fungsi organisasi menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan dan dengan integritas yang tinggi maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, kemudian berkaitan dengan penaksiran resiko juga dijelaskan bahwa dalam hal penilaian untuk pencapaian tingkat efisiensi dan efektivitas dilakukan dengan cara terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan masalah pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **Analisis Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya penurunan efektivitas penerimaan pajak hotel yang mengindikasikan sistem pengendalian intern dalam hal penilaian resiko tidak berjalan baik pada DISPENDA Kota Medan.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame yang menurun dari tahun ke tahun dan cukup rendah di DISPENDA Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena – fenomena dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah berjalan dengan baik.?
2. Apakah sistem pengendalian intern penerimaan pajak reklame pada Dians Pendapatan Daerah Kota Medan telah berjalan dengan baik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pengendalian Pajak Hotel dan Pajak Rekalme yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan

Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak. Kemudian dengan melihat hasil analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak, DISPENDA Kota Medan juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangannya dan dapat diketahui sejauh mana prstasi yang dicapai perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat membatu pihak manejemen dalam menjalankan usahanya.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan refrensi khususnya untuk mengkaji topik – topic yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian dan tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai variasi kepentingan dan dan pengertian. Fungsi dari pengendalian intern semakin berkembang perusahaan. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern.

Menurut Siti dan Ely (2010 :312) “ Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lainyadalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut ini :

- a. Keandalan pealporan keuangan
- b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peaturan
- d. Efektivitas dan efisensi opearasi

Pengendalian intern bagi suatu perusahaan terutama yang sudah *go public* merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, direksi wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya serta model mana yang diadopsi (atau sepenuhnya didesai sendiri), dan wajib di audit oleh auditor ekstern. Faktor – faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain:

- a. Perkembangan dan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan – kesalahan serta kecurangan – kecurangan terletak pada management, sehingga management harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan- kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- d. Pengawasan yang “ built – in” langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa secara (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

Menurut Beasley, Alvin, Elder dan Jusuf (2011 :137) “Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut penjelasan tujuannya:

- a. Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun personalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai

dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektifitas terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.

b. efektivitas dan efisiensi operasi

pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisiensi dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

d. Perusahaan public, non public maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung. Misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak – hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

b. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) ada lima unsure komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini :

a. Lingkungan pengendalian

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang – orangnya.

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisi terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

c. **Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. **Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang untuk memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. **Pemantauan**

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

c. Fungsi Pengendalian Intern

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Kwary, D. A Fitriyani D. (2007 : 4) mengemukakan bahwa pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut :

1. **Penendalian untuk pencegahan (*Preventive control*)**

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.

2. Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*)

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3. Pengendalian korektif (*corrective control*)

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasikan masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar masalah dapat diminimalisasikan atau dihilangkan.

d. Komponen Pengendalian Internal

Menurut COSO, dalam buku William C. Boyton N. Johnson dan Walter G. Kell yang diterjemahkan oleh Budi. S.I (2007), menyatakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang – orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian memiliki tujuan komponen, yaitu :

- a) Integritas dan nilai – nilai etik
- b) Komitmen pada kompetensi
- c) Falsafah manajemen
- d) Struktur organisasi
- e) Dewan komisaris dan komite audit yang efektif

- f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
 - g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian
2. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan mengidentifikasi, dan menganalisis resiko yang timbul atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini :

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
- d) Teknologi baru
- e) Lini produk, produk atau aktivitas baru
- f) Restrukturisasi korporat
- g) Opearasi luar negeri
- h) Penerbitan standar akuntansi yang baru.

3. Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan

Aktivitas pengendalian memiliki lima kompones, yaitu :

- a) Pemisahan tugas yang memadai
- b) Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas
- c) Pengendalian atas aktiva dan catatan

d) Pengecekan independen dan pelaksanaan

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan juga kejadian serta kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

5. Pemantauan

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambialn tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

2. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain – lain PAD yang sah.

Menurut Nurcholis (2007 : 1182), “ pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retibusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain – lain yang sah.

Menurut Warsito (2009 ; 128), “ pendapatan asli daerah (PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milikm daerah (BUMD), dan pendaptan asli daerah lainnya yang sah “

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2008 : 38) , “ Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ash dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerh sebagai perwujutan asas desentralisasi.

Pendaptan asli daerah berdasrakan Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan diperoleh daerah yang yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama bagi daerah. Bila PAD menurun, maka pemerintah akan kesulitan dalam membangun infrastruktur didaerah. Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB – KB). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dikeluarkan atas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Kendaraan adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peraltan lainnya yang berfungsi sebagai untuk mengubah sesuatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang tak

bergerak. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk dengan dipungut bayaran.

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Safitri, 2009).

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literature – literature perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulair). Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa public. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan fungsi regulair merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan

demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai keperluan pengeluaran yang ditentukana oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendaptana daerah dalam hal pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini menghasruskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

PAD merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Tony Masyahrul (2007 :5), “ Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK I, maupun pemerintah daerah TK II) hasil ini dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah APBD, sedangkan menurut Mardiasmo, (2007 :5) “pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan pearturan perundang - undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat

kemampuan daerah dalam pembiayaan dalam menyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sednagkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah.

Fungsi – fungsi pemerintah daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal/ pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Prakosa (2007) menjelaskan bahwa pajak daerah sejak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU no. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota/ Kabupaten terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambialn bahan galian golongan c
7. Pajak parker

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pemungut retribusi (Prakosa, 2008). Retribusi daerah terdiri dari 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah ini diterangkan penelitian – penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern :

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

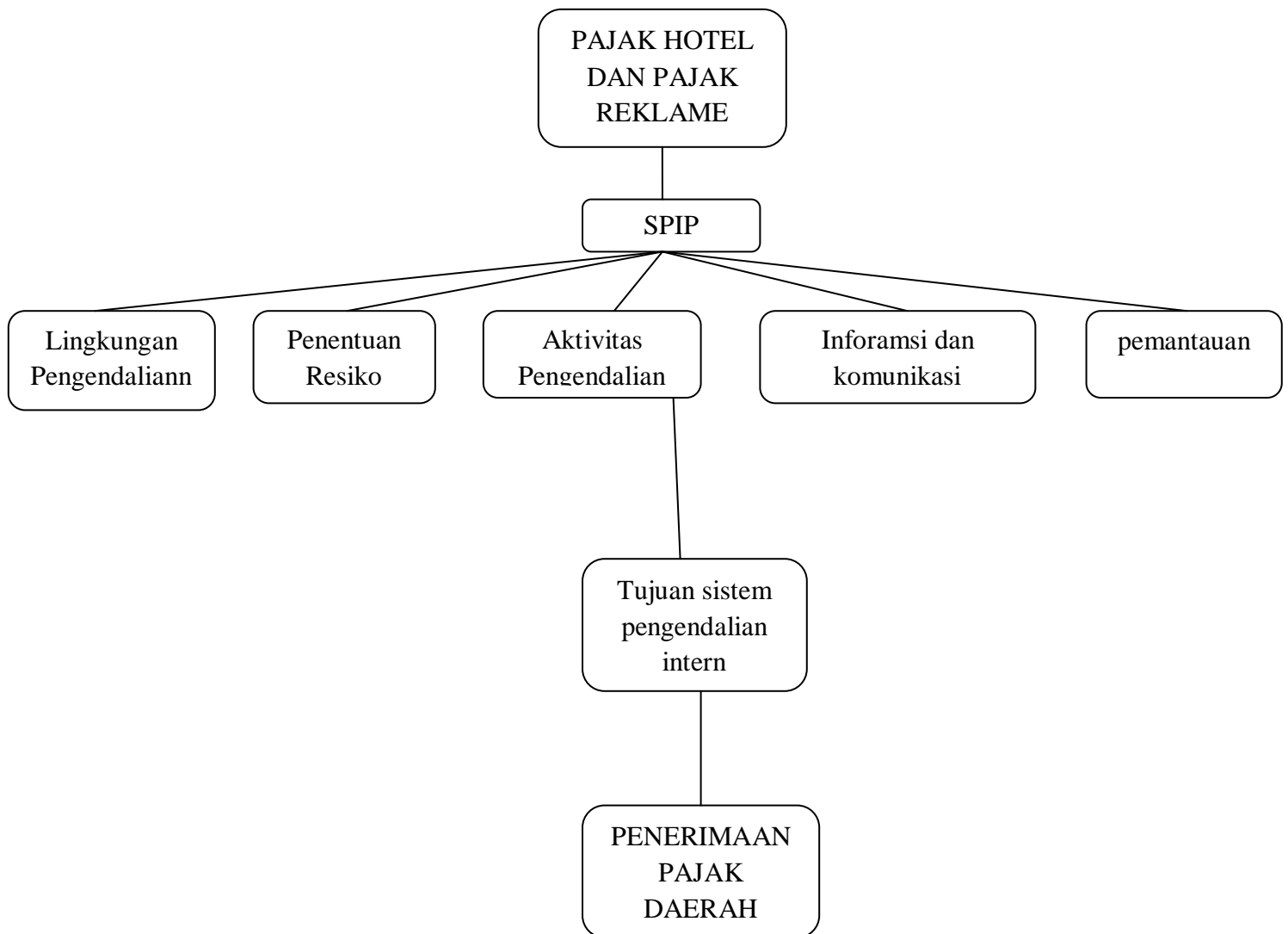
No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Dita (2014)	Evaluasai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Dispenda Malang)	Dinas Pedanpatan Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidak sesuaian dengan pedoman Pearturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakuakn seksi pendaftaran dan pendataan.
2	Priska (2015)	Analisa Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu berhubungan sumber daya manuum diberlakukan reward keapda peagwai. Namun sia yang masih kurang dibidang pendapatan dan beberapa unsure pengendalian intern sudah berjalan dengan baik.

	Meli (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Pemungutan pajak bumi dan Bangunan dikecamatan Rambah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya otoritas oleh pihak kantor perwakilan pajak pasir pengaraian. Dalam tahapan penyampaian SPPT di kecamatan Rambah juga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kabuapatenn Roakn Hulu.
--	-------------	---	--

B. Kerangka Berfikir

Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengatur aliran kas pendapatan daerah, dispenda Kota Medan perlu melakukan sebuah pengendalian intern pada penerimaan pajak daerah, sistem pengendalian ini dimaksudkan untuk mengendalikan pendapatan daerah dari pajak daerah dan mencegah tindakan – tindakan yang merugikan karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian, pendapatan daerah yang masuk dan dikeluarkan harus sesuai dengan prosedur dan melalui sistem pengendalian yang baik. Ada lima unsur pengendalian sesuai dengan SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan. Adapun unsur – unsur ini akan digunakan untuk melihat bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan pajak

daerah pada Dina Pendaptan Daerah Kota Medan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana menurut sugiono (2004, hal 11) ,” deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, meyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan”

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variable yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sitem Pengendalian Pajak. Adapun unsur – unsure pengendaliannya adalah : Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pengawasan.

Tabel III. 1 Kisi – Kisi Wawancara

No	Variabel	Dimensi
1	Sistem Pengendalian intern Pemerintah	a. Lingkungan pengendalian
		b. Penaksiran resiko
		c.aktivitas Pengendalian
		d. Informasi dan komunikasi
		e. pengawasan

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan ditempat Dinas Pendapatan Kota Medan

Waktu penelitian

Adapun penelitian ini direncanakan dari bulan Desember sampai April 2017

Tabel III.2

Waktu Penelitian Direncanakan

No.	KEGIATAN	2016- 2017																		
		Desember				Januari				Februari				Maret				April		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Prariset	■	■																	
2.	Pengajuan Judul			■	■															
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■											
4.	Seminar Proposal									■	■	■	■							
5.	Penelitian Selanjutnya													■	■	■	■			
6.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan/ Pernyataan yang tidak berbentuk angka-angka dan data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka yang akan dideskripsikan dan direpresentasikan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap objek penelitian, dan yang menjadi objek wawancara adalah pihak DISPEND Kota Medan pada bagian humas, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa bukti-bukti seperti buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan daerah DISPENDA Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang.
2. Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan analisis yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data tentang sistem

pengendalian intern pemerintahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data dan teori pendukung
2. Melakukan observasi dan wawancara
3. Melakukan analisa hasil penelitian
4. Menginterpretasikan data mendeskripsikan hasil penelitian
5. Memberikan kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dispenda Kota Medan

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 102/II/WK tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Serwilda Tingkat II Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuaangan berubah momenklatur menjadi Direktorat Keuangan sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Walikota Medan tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/WK (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I tanggal 7 November 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74). Sehingga sejak tanggal 1 April 1975, sub Direktorat Pendapatn Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah.

Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya berdasarkan SK Walikota Medan Nomor 143/II/WK, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai institusi teknis, yang membantu Pemerintah Kota (Walikota) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu Dinas tersebut adalah Dispenda Kota Medan. Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

a. Lingkungan Penelitian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar yang utama. Di dalam lingkungan ini tercermin pada sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian instansi. Lingkungan pengendalian erat hubungannya dengan pelaksanaan operasional, yaitu para pegawai yang melaksanakan kegiatan instansi. Sehingga secara langsung akan menentukan corak organisasi yang akan memengaruhi kesadaran mengendalikan pegawainnya yang terdiri dari :

- 1) Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic believe*) yang menjadi parameter bagi instansi dan pegawainnya, sedangkan gaya operasi mencerminkan ide menejer tentang bagaimana operasional suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Tujuan utama manajemen adalah meningkatkan laba instansi dan mengembangkan instansi. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya omset penjualan setiap bulannya. Kepala Dinas selalu memperhatikan pencapaian target pendapatan hotel dan reklame, yaitu dengan membandingkan antara proyeksi/anggaran dan realisasinya. Selain itu Kepala Dinas juga selalu mengevaluasi hasil laporan dan bawahannya.

Pemimpin Dispenda Kota Medan yaitu Kepala Dinas sangat memperhatikan staf dan pegawainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dan pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempertanggung jawabkan pekerja kepada atasannya. Falsafah manajemen dan gaya dan operasi ini dapat mengurangi dan merendahkan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu di dalam instansi.

2) Struktur Organisasi

Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi instansi untuk mencapai keseluruhan tujuan instansi yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Penentuan struktur organisasi yang memadai termasuk memikirkan lingkup pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta garis komando yang jelas. Struktur organisasi yang ditetapkan di Dispenda Kota Medan disusun secara jelas dan sistematis, sehingga tidak ada tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas, baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

3) Pendelegasian wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diuraikan dalam struktur organisasi sehingga setiap pegawai akan bekerja sesuai dengan bagiannya tugasnya seperti yang tercantum dalam uraian tugas, termasuk bagian yang terlibat dalam penerimaan, pengeluaran, otorisasi, dan pemeriksaan kas. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tersebut biasanya melalui surat khusus yang mendelegasikan wewenang kepada penerimanya.

4) Kebijakan Instansi

Ada beberapa kebijakan Eksternal yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan omzet penjualan reklame. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain:

a) Kebijakan Pajak

- (1) Tidak seluruhnya biro reklame/agency advertising membayar pajak hotel dan reklame dengan uang, baik tunai maupun kredit, namun ada juga yang membayar melalui pajak berupa barang maupun bentuk lain, misalnya voucher belanja, produk, tiket pesawat dan lain sebagainya.
- (2) Sistem pajak adalah program di suatu media yang pembayarannya dapat berupa barang ataupun dalam bentuk lain sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan.
- (3) Piutang pajak tersebut berakhir apabila kedua belah pihak telah menerima manfaatnya.

(4) Oleh sebab itu, pihak manajemen dispenda Kota Medan memberikan kebijakan yang luwes dan tidak kaku kepada kliennya dalam kerjasama pemasangan reklame meskipun pembayarannya dilakukan dengan pajak barang. Dalam hal ini pihak Dispenda kota Medan menempatkan seseorang piñata administrasi keuangan khusus yang menangani pembayaran pajak tersebut. Tugas utamanya adalah memantau pemakaian program kerjasama pajak yang digunakan oleh pihak Dispenda Kota Medan maupun pihak agency atau klien yang melakukan kerjasama pajak.

Disamping itu pimpinan instansi juga memberikan kebijakan internal antara lain:

- 1) Memberikan perhatian kepada pegawainya dengan cara memberikan gaji yang memadai
- 2) Memberikan tunjangan- tunjangan bagi pegawai yang menduduki jabatan- jabatan tertentu, tunjangan hari raya berdasarkan lamanya bekerja, dan dan pemberian cuti berkala.
- 3) Kepala Dinas/ Pimpinan perwakilan menilai prestasi bawahannya dan memberikan kompensasi atas prestasi bawahannya seperti pemberian bonus, sehingga pegawai akan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi instansi.

b. Perkiraan Resiko yang Timbul

Perkiraan risiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern didalam instansi. Risiko –risiko yang ada disebabkan oleh faktor – faktor intern dan ekstern. Risiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut :

1) Perubahan Lingkungan

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi instansi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda. Dalam hal ini Dispenda Kota Medan terus berusaha melakukan penyempurnaan :

- a) Pengendalian intern terhadap penerimaan
- b) Pengendalian terhadap cara penagihan pajak
- c) Dilakukannya evaluasi dan perbaiki – perbaiki yang terus menerus atas pengendalian intern yang telah berjalan selama ini, jika terdapat kelemahan, termasuk kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan yang ada, sehingga dapat meminimalkan atau mengantisipasi resiko yang mungkin timbul. Misalnya bila sebelumnya penagihan dirangkap oleh seorang masanger Dispenda Kota Medan yang membentuk team khusus untuk untuk menangani penagihan pajak.

2) Pegawai Baru

Dengan adanya pegawai baru, ada beberapa keuntungan yang didapat :

- a) Pegawai baru biasanya mempunyai semangat kerja tinggi, sehingga akan memacu/ member motivasi kepada pegawai lainnya untuk bekerja dengan lebih baik.
- b) Terdapat ide – ide baru dan pandangan atau pengertian lain atas pengendalian intern yang sudah diterapkna dalam instansi yang sangat membantu bial pegawai tersebut berkualitas baik.

Untuk mendapatkan pegawai yang baik dan berkualitas tersebut Dispenda Kota Medan menerapkan seleksi yang sangat ketat, baik saat wawancara, tes tertulis. Selanjutnya pihak instansi memberikan kesempatan bagi pegawai baru untuk mengikuti masa percobaan selama tiga bulan. Adapun tujuan diberikan masa percobaan selama tiga bulan agar dapat dievaluasi cara kerjanya serta diberikan pelatihan – pelatihan mengenai pekerjaan yang menjadi tugasnya, sehingga pegawai – pegawai yang ada instansi benar – benar pegawai yang berkualitas. Selain itu, terdapat kebijakan instansi dalam merekrut pegawai baru, yaitu pegawai yang ada di Dispenda Kota Medan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga.

3) Teknologi Baru

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat maka, Dispenda Kota Medan telah menggunakan sistem komputerisasi dan jaringan internet terkoneksi dengan pusat.

Hal ini dimaksudkan untuk :

- a) Memperlancar pengiriman data baik itu data keuangan maupun data – data yang lain. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini instansi dituntut untuk bisa mengirimkan data keuangan hanya dalam hitungan beberapa menit. Dimana dahulu ketika internet belum seperti saat ini, date line pengiriman materi data keuangan 3 hari.
- b) Dalam membuat invoice, faktur pajak, dan lain – lain bisa langsung terpantau secara online dengan kantor pusat di Medan, sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang mungkin terjadi dan mengefisienkan atau menghemat waktu kerja.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (control activities) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan bahwa diperlunya tindakan untuk meredam risiko dalam upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum . unsur – unsur aktivitas pengendalian sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Review

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara penampilan kerja actual dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Tinjauan ulang atas pelaksanaan kerja ini biasanya dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap bagian – bagian yang terdapat didalam instansi. Jika terjadi penyimpangan maka akan dilakukan tindakan koreksi.

2) Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik ini terdiri dari prosedur – prosedur pengamanan atas kekayaan dan catatan instansi. Kegiatan pengendalian fisik ini dilaksanakan untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan fisik dan menghindari adanya penyelewengan.

c) Pengendalian terhadap kolektibilitas dan pajak hotel dan reklame

Penagihan pajak hotel dan reklame dilakukan oleh caller pada saat saldo berjalan dan menjelang jatuh tempo, baik melalui telepon, surat tagihan (surat menyurat) maupun mendatangi secara langsung. Untuk pembayaran dengan bilyet giro atau cek maupun transfer langsung ke rekening instansi sesuai dengan kesepakatan awak dan sesuai diskon yang dipilih. Biasanya untuk biro reklame/ agency advertising yang baru Menjadi rekanan dan pemasang langsung atau advertiser diminta untuk membayar tagihan secara tunai atau bilyet giro terlampir sebelum reklame terbit / ditayangkan. Meskipun

demikian, masih juga terdapat pembayaran yang dilakukan kemudian hari dengan perjanjian – perjanjian tertentu dengan pihak Dispenda Kota Medan.

3) Pemisahan Tugas

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan – kesalahan yang disengaja atau tidak dalam mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi, dan pemeliharaan asset. Struktur organisasi Dispenda Kota Medan mencerminkan pemisahan tugas yang jelas seperti dibawah ini :

a) Fungsi Otorisasi

Wewenang otorisasi ada pada bagian pemberian kredit, penentuan besarnya diskon. Hal tersebut sekaligus sebagai pengendalian terhadap harga, untuk menghindari rusaknya harga.

b) Fungsi pengawasan

Umumnya fungsi ini dilaksanakan oleh masing – masing bagian yang bersangkutan, terutama Kepala Dinas. Misalnya untuk pengawasan penagihan pajak dilakukan oleh head collector, account executive oleh coordinator Account executive, dan lain sebagainya.

c) Fungsi Pencatatan

Fungsi ini mencatat transaksi – transaksi yang terjadi dalam instansi yang dapat mengubah struktur kekayaan instansi, baik penerimaan maupun pengeluaran kas.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi.

d) Fungsi Penyimpanan

- e) Bagian kas melakukan kegiatan menyimpan uang yang ada didalam instansi. Bagian penyimpanan ini melakukan penerimaan uang untuk keperluan operasional. Fungsi penyimpanan ini dilakukan oleh kasir.

d. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengendalian intern yang efektif, maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi yang baik, panduan kebijakan yang tercantum pada peraturan Dispenda Kota Medan dan laporan keuangan yang disusun secara periodic. Unsur – unsure dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1) Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah

Bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti – bukti pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern dan instansi dan proses pengambilan keputusan oleh Direktur.

2) Pengklasifikasian transaksi keuangan

Bagian akuntansi selalu mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat transaksi tersebut terjadi dan mengklasifikasian transaksi tersebut kedalam pos – pos sesuai dengan rekeningnya dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian yang diberikan oleh Bagian Akuntansi tersebut mudah dimengerti oleh yang membutuhkannya.

3) Komunikasi

Komunikasi dalam instansi baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan manajemen maupun tulisan yang berupa laporan pertanggungjawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah pengendalian intern di Dispenda Kota Medan. Kasir selalu meminta persetujuan dari Bagian Keuangan dalam mengeluarkan uang. Kemudian keuangan memeriksa bukti – bukti transaksi dengan uang yang ada dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan. Selanjutnya Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan mempertanggungjawabkan kepada Direktur.

e. Pemantauan / Pengawasan

Pemantauan / Pengawasan kegiatan rutin Dispenda Kota Medan dilaksanakan oleh bagian – bagian yang terkait. Misalnya pemantauan untuk kegiatan penerimaan dan pengeluaran serta pencatatan kas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Akuntansi dan Keuangan. Pemantauan secara umum pada Dispenda Kota Medan dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap bagian – bagian yang ada didalam instansi. Kemudian hasil dari pemantauan tersebut dievaluasi dan diambil tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Pemantauan yang dilakukan terhadap kas merupakan pemantauan terhadap :

- 1) Jumlah piutang lancar, piutang amcet anatara catatan dengan kondisi sebenarnya apakah telah sesuai.
- 2) Peraturan dan kebijakan yang ada
- 3) Pencatatan lembur pegawai dan jumlah pegawai agar tidak terjadi pembayaran gaji pada orang yang salah.

- 4) Pencatatan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan bukti – bukti yang telah diotorisasi.

2. Kesimpulan analisis Kualitatif

Dari uraian Analisis Kualitatif tersebut diatas maka, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Piutang merupakan salah satu aktiva yang bersifat likuid, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi resiko yang mungkin terjadi seperti tertagihnya piutang tepat waktu atau bahkan konsumen gagal bayar.
- b. Sistem Pengendalian Intern terhadap Pajak hotel dan reklame Dispenda Kota Medan telah sesuai dengan teori sistem Intern. Hal ini bukti dengan digunakannya elemen – elemen sistem Pengendalian Intern yang meliputi :

- 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian merupakan dasar yang utama, didalam lingkungan ini tercermin pada sikap dan tindakan manajemen mengenai pengendalian perusahaan. Lingkungan pengendalian erat hubungannya dengan pelaksanaan operasional, yaitu para pegawai yang melaksanakan kegiatan perusahaan. Sehingga secara langsung akan menentukan corak organisasi yang akan mempengaruhi kesadaran pengendalian pegawainya, yang terdiri dari :

- a) Falsafah Manajemen dan Gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic believe) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan pegawainya, sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manejer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha harus

dilaksanakan. Tujuan utama manajemen adalah meningkatkan laba perusahaan dan mengembangkan perusahaan.

b) Struktur organisasi

Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi perusahaan untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi. Penentuan struktur organisasi yang memadai termasuk memikirkan lingkup pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta garis komando yang jelas. Struktur organisasi yang ditetapkan di dispenda Kota Medan disusun secara jelas dan sistematis, sehingga tidak ada tugas rangkap yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Struktur organisasi tersebut menggambarkan uraian tugas yang jelas, baik menyangkut wewenang, tanggung jawab, fungsi maupun hubungan organisasi, sehingga terlihat adanya pemisahan tugas dan fungsi yang cukup baik yang memudahkan pekerjaan seseorang dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

c) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diuraikan dalam struktur organisasi sehingga setiap pegawai akan bekerja sesuai dengan bagian dan tugasnya seperti yang tercantum dalam uraian tugas, termasuk bagian yang terlibat dalam penerimaan, pengeluaran, otorisasi, dan pemeriksaan kas. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tersebut biasanya melalui surat khusus yang mendelegasikan wewenang kepada penerimanya.

d) Kebijakan Perusahaan

Pimpinan perusahaan juga memberikan kebijakan internal antara lain :

- 1) Memberikan perhatian kepada pegawainya dengan cara memberikan gaji yang memadai
- 2) Memberikan tunjangan – tunjangan bagi pegawai yang menduduki jabatan – jabatan tertentu, tunjangan hari raya berdasarkan lamanya bekerja, dan pemberian cuti berkala.
- 3) Pimpinan menilai prestasi bawahannya dan memberikan kompensasi atas prestasi bawahannya seperti pemberian bonus, sehingga pegawai akan semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

2) Perkiraan Risiko Yang Timbul

Perkiraan risiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern didalam perusahaan. Risiko – risiko yang ada disebabkan oleh faktor – faktor intern dan ektern. Risiko dapat timbul oleh keadaan sebagai berikut :

3. Perubahan Lingkungan Dispenda di Kota Medan

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi perusahaan dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda. Dalam hal ini Dispenda Kota Medan terus berusaha melakukan penyempurnaan :

- a. Pengendalian terhadap strategi penjualan, sehingga diharapkan perusahaan dapat bersaing ditengah ketatnya persaingan antar media.
- b. Pengendalian terhadap cara penagihan pajak, sehingga diharapkan agar pajak dapat dikendalikan

4. Pegawai baru

Dengan adanya pegawai baru, ada beberapa keuntungan yang didapat :

- a. Pegawai baru biasanya mempunyai semangat kerja tinggi, sehingga akan memacu/ member motivasi kepada pegawai lainnya untuk bekerja dengan lebih baik.
- b. Disamping itu, terdapat ide – ide baru dan pandangan arau pengertian lain atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan yang sangat membantu bila pegawai tersebut berkualitas baik.

Untuk mendapatkan pegawai yang baik dan berkualitas tersebut Dispenda Kota Medan menerapkan seleksi yang sangat ketat, baik saat wawancara, tes tertulis. Sealnjutnya pihak perusahaan memberikan kesempatan bagi pegawai baru untuk mengikutimasa percobaan selama tiga bulan agar dapat dievaluasi cara kerjanya serta diberikan pelatihan – pelatihan mengenai pekerjaan yang menjadi tugasnya, sehingga pegawai – pegawai yang ada di perusahaan benar – benar pegawai yang berkualitas.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (control activities) terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirasakan bahwa diperlunya tindakan untuk meredam resiko dalam upaya pencapaian keseluruhan tujuan secara umum. Unsure – unsure aktivitas pengendalian sebagai berikut :

2) Pelaksanaan Review

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara penampilan kerja actual dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan

3) Pengendalian fisik

Pengendalian fisik ini terdiri dari prosedur – prosedur pengamana atas kekayaan dan catatan perusahaan. Kegiatan pengendalian fisiki ini dilaksanakn untuk

menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari adanya penyelewengan.

4) Informasi dan komunikasi

Untuk mencapai pengendalian intern yang efektif, maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi yang baik, panduan kebijakan yang tercantum pada peraturan Dispenda Kota Medan dan Laporan Keuangan yang disusun secara periodic. Unsur – unsur dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah

Bagian Akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti – bukti pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern di perusahaan dan proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan.

2. Pengklarifikasian transaksi keuangan

Bagian Akuntansi selalu mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat transaksi tersebut terjadi dan mengklarifikasikan transaksi tersebut ke dalam pos – pos sesuai dengan rekeningnya dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian yang diberikan oleh Bagian Akuntansi tersebut mudah dimengerti oleh yang membutuhkannya.

3. Komunikasi

Komunikasi didalam perusahaan yang baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan oleh manajemen maupun tulisan yang berupa laporan pertanggungjawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah pengendalian intern di Dispenda Kota Medan. Kasir selalu meminta persetujuan dari Bagian Keuangan dalam mengeluarkan uang. Kemudian bagian keuangan memeriksa bukti – bukti transaksi dengan uang yang ada dan mebuat laporan kepada Kepala Bagian Keuangan mempertanggungjawaban kepada Pimpinan

4. Pemantauan / pengawasan

Pemantauan / Pengawasan kegiatan rutin Dispenda Kota Medan dilaksanakan oleh bagian – bagian yang terkait. Kemudian hasil dari pemantauan tersebut dievaluasi dan diambil tindakan koreksi bila terjadinya penyimpangan. Pemantauan yang dilakukan terhadap kas merupakan pemantauan terhadap :

- 1) Peraturan dan kebijakan yang ada
- 2) Pencatatan lembur pegawai dan jumlah pegawai agar tidak terjadi pembayaran gaji pada orang yang salah.
- 3) Pencatatan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan bukti – bukti yang telah diotorisasi.

B. Pembahasan

1. Analisa Kuantitatif

a. Pajak Hotel

a) Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Tabel IV.1
Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

Hotel			
Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas
2012	Rp. 65.859.844	Rp. 81.000.000	81,3%
2013	Rp. 76.944.413	Rp. 81.000.000	95,0%
2014	Rp. 82.051.748	Rp. 81.500.000	100,7%
2015	Rp. 84.200.613	Rp. 87.980.000	92,86%
2016	Rp. 95.322.427	Rp. 91.980.801	104,18%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 diperoleh realisasi sebesar Rp. 65.859.844 dengan target sebesar Rp. 81.000.000 maka diperoleh efektivitas sebesar 81,3%. Pada tahun 2013 diperoleh realisasi sebesar Rp. 76.944.413 dengan target sebesar Rp. 81.000.000 maka diperoleh efektivitas sebesar 95,0%. Pada tahun 2014 diperoleh realisasi sebesar Rp. 82.051.748 dengan target sebesar Rp. 81.500.000 maka diperoleh efektivitas sebesar 100,7%. Pada tahun 2015 diperoleh realisasi sebesar Rp. 84.200.613 dengan target sebesar Rp. 87.980.000 maka diperoleh efektivitas 92,86%. Pada tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar Rp. 95.322.427 dengan target sebesar Rp. 91.980.801 maka diperoleh efektivitas sebesar 104,18%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel mengalami naik turun. Pada tahun 2012 sebesar 81,31%, pada tahun 2014 efektivitas mengalami kenaikan dari tahun 2013 95,0% menjadi 100,7% sedangkan pada tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 92,86% menjadi 104,18%.

Adapun jumlah WP Hotel yang terdaftar dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Klasifikasi hotel	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bintang 5	3	4	4	5	5	5	5	5
2	Bintang 4	5	5	5	6	6	7	10	11
3	Bintang 3	11	13	17	19	21	23	26	27
4	Bintang 2	1	1	1	2	3	4	4	4
5	Bintang 1	15	15	16	16	18	18	20	20
6	Melati 3	26	29	44	50	58	65	70	85
7	Melati 2	17	20	42	42	44	45	45	45
8	Melati 1	34	38	81	84	88	88	88	89
	jumlah	112	125	210	224	243	255	268	286

b. Pajak Reklame

1.) Target dan realisasi penerimaan pajak reklame

Adapun tingkat efektivitas pajak reklame dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tabel IV.3
Tingkat Efektivitas Pajak Reklame

Reklame			
Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas
2012	Rp. 25.954.914	Rp. 64.161.250	40,45%
2013	Rp.23.343.045	Rp. 69.161.250	33,76%
2014	Rp. 10.709.910	Rp. 59.161.250	18,10%
2015	Rp. 3.551.947	Rp. 49.161.250	7,23%
2016	Rp.17.508.256	Rp. 89.823.375	19,49%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 diperoleh realisasi sebesar Rp. 25.954.914 dengan target sebesar Rp. 64.161.250 maka diperoleh efektivitas sebesar 40,45%. Pada tahun 2013 diperoleh realisasi sebesar Rp. 23.343.045 dengan target sebesar Rp. 69.161.250 maka diperoleh efektivitas sebesar 33,76%. Pada tahun 2014 diperoleh realisasi sebesar Rp. 10.709.910 dengan target sebesar Rp. 59.161.250 maka diperoleh efektivitas sebesar 18,10%. Pada tahun 2015 diperoleh realisasi sebesar Rp. 3.551.947 dengan target sebesar Rp. 49.161.250 maka diperoleh efektivitas sebesar 7,23%. Pada tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar Rp. 17.508.256 dengan target sebesar Rp. 89.823.375 maka diperoleh efektivitas sebesar 19,49%.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2013 s/d 2015. Pada tahun 2013 efektivitas mengalami penurunan dari 40,45% menjadi 33,76%. Pada tahun 2014 efektivitas mengalami penurunan dari 33,76% menjadi 18,10%. Pada tahun 2015 efektivitas mengalami penurunan dari 18,10% menjadi 7,23%. Efektivitas yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,23%.

2. Analisa Kualitatif

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian intern maka unsur-unsur sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Dispenda Kota Medan:

1. Lingkungan Pengendalian

a. Nilai integritas dan etika

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pihak dispenda menerapkan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari atas ke bawahan selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh dispenda berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi dan tujuan dispenda.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Dispenda mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara profesional. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak dispenda dalam memilihnya masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Pembinaan intern yang dilakukan di dispenda diawali oleh kepala dinas kemudian pengawasan oleh kepala bidang, kepala seksi lalu coordinator pelaksanaan dengan memberikan arahan tentang penyelenggaraan cara penagihan pajak daerah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu respon dan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.

d. Memiliki struktur Organisasi

struktur organisasi pada dispenda kota medan sesuai dengan peraturan daerah. Dispenda Kota Medan mempunyai bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian.

e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pada dispenda kota medan pembagian tugas dilaksanakan secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing bagian yang ada.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Pada dispenda kota medan memiliki program-program pelatihan kepada para pegawainya, dan pemberian sanksi tegas atas pelanggaran aturan oleh pegawainya.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

Pada dispenda kota medan selalu dilakukan pengawasan oleh badan pemeriksaan keuangan selama 6 bulan sekali.

Dapat disimpulkan bahwa SPI (Sstem Pengendalian Intern) pada dispenda kota medan cukup baik karna memiliki tata cara dan prosedur seperti.

- Nilai integritas dan etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang kondusif
- Memilki struktur organisasi
- Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
- Penyusunan dan penerapn kebijakan yang sehat tentanh SDM

Sedangkan menurut teori yang dikutip dari Siti dan Ely (2010:312)

“ pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, personel laimmya dalam suatu entitas yang dirancang untuk meberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pengendalian intern pajak hotel sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari cukup tingginya efektivitas realisasi yang diperoleh.
2. Sistem pengendalian intern pajak reklame belum cukup baik. Ini dapat dilihat dari rendahnya efektivitas realisasi yang diperoleh.

B. Saran

1. Diharapkan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan untuk pajak hotel dan pajak reklame lebih ditingkatkan lagi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.
2. Diharapkan dinas pendapatan daerah kota medan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak hotel dan pajak reklame yang sesuai dengan potensi yang ada di kota medan.
3. Diharapkan Dinas pendapatan daerah kota medan menuangkan standar oprasional prosedur dalam pengawasan, agar kedisiplinan para pegawai dapat terjaga, lebih memusatkan titik- titik pengawasan yang strategis agar informasi yang diterima oleh obyektif dan menghasilkan pengawasan yang efektif.
4. Diharapkan pihak Dispenda Kota medan segera memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan- kesalahan yang terjadi dalam pengawasan, dan segera mengatasi kendala- kendala yang sering terjadi disetiap tahunnya.

5. Diharapkan pegawai Dispenda Kota medan lebih tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan dokumen- dokumen agar tidak terjadi penumpukan dokumen dan dapat memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak reklame.
6. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan pembangunan infrastruktur di kota medan sehingga mereka terguguh untuk membayar pajak.
7. Fungsi pengawasan disini masih kurang, untuk mengurangi tingkat kebocoran diharapkan untuk kedepannya pihak dispenda dapat mencontoh pajak pusat yaitu dapat membayar melalui bank persepsi dan dapat melaporkan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin. A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf, 2011, Audit dan Jasa Assurance : Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Boynton, William C. Johnson., Raymond N. and Kell, Walter G. "Modern Auditing",. Edisi Ketujuh, Jilid 2, Erlangga, Jakarta. 2007. Diterjemahkan oleh Budi
- Damang. (2011). Pendapatan. Asli. Daerah. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendaptan-asli-daerah.html>
- Dita (2014). Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Dispenda Malang)
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu (2010). AUDITING., Konsep Dasar dan. Pedoman Pemeriksaan Auntansi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta 2007
- Herlina, Rahman, Pendapatan Asli Daerah, Jakarta:Arifgosita, 2008
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Irma Safitri. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatn Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Uum (DAU) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Kwary, D. A., Fitriasari D. (2008:4) Prinsip- prinsip Manajemen Keuangan. Edisi 12 Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi revisi 2007. Yogyakarta: Penerbit Andi. Bambang.
- Melti (2015) Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Prakosa. 2008 Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang Proporsional. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Priska (2015) Analisa Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara

Tony Marsyahrul, 2007. Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo

Warsito. 2009. Hukum Pajak . Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.